BUDAYA KORUPSI DAN PERUBAHAN BAGAIMANA SEBAIKNYA KITA MENANGGAPINYA

Oleh : Dra. Jat Jat Wirijadinata, Mag. rer. Publ.^{*)}

Betapa panasnya kuping ini seandainya kita masih mampu mendengar, dan betapa pedih hati ini bila seandainya kita masih memiliki nurani. Betapa serasa diinjak-injak kita ini seandainya masih memiliki harga diri. Seluruh mata dari seluruh pelosok dunia serasa memandang kita dengan penuh keheranan, karena dunia meyakini bahwa Indonesia, negara kita tercinta merupakan negara terkorup di dunia. Haruskah kita selalu tertunduk, karena menanggung malu ?Tidak! ,kita bangsa Indonesia, ingin duduk, berdiri, berjalan sejajar dengan bangsa lainnya, sebagai bangsa yang memiliki kedudukan terhormat karena dimuliakan oleh Allah sang pencipta alam semesta yang telah mendudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia diantara mahluk ciptaan-Nya. Banyak fihak melihat bahwa untuk mengatasinya perlu ada perubahan budaya, kerja keras, komitmen yang tinggi dari semua jajaran, baik pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha untuk memberantas korupsi. Saudara-saudra kita dibelahan dunia lain dan negara tetangga kita, telah berhasil mengatasinya, karena sadar-sesadar-sadarnya bahwa korupsi yang merajalela akan menghancurkan segalanya. Warga Hongkong misalnya tidak akan membiarkan korupsi melanda kembali negaranya, karena mereka sadar akan bahaya korupsi, dan mereka telah membuktikan, betapa besar manfaat yang diperoleh dari suatu kehidupan yang bebas dari korupsi.

PERUBAHAN BUDAYA DAN TEKNOLOGI

Lisi pernah memberikan gambaran, bagaimana teknologi dapat merubah suatu budaya, di Australia misalnya suku Aborigin yang dahulu menggunakan kapak batu guna memenuhi segala kehidupannya, seperti berburu, membelah kayu, membangun rumah, Untuk membuat kapak batu diperlukan tenaga yang besar, apalagi batu untuk bahan kapak berada jauh di desa lain pada suku lainnya, maka biasanya hanya kaum laki-laki yang bisa membuat kapak, dan hanya kaum laki-laki yang memilikinya. Dikala para suami bekerja diladang atau berburu, maka para

wanita bila membutuhkan kapak, ia terpaksa pinjam kepada ayahnya atau kepada saudara laki-laknya, tapi tidak pernah dari paman atau saudara sepupunya. Hubungan ini menjadi tumbuh sebagai aturan-aturan yang diberlakukan dan mendorong kepada budaya maskulinitas dan senioritas berdasarkan usia. Dalam hubungan dengan suku lainnya, maka setiap tahun selama musim panas mereka berdagang bahan mentah batu untuk membuat kapak dan juga berdagang kapak dari batu tersebut. Perdagangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai kehidupan dan berbagai upacara.

^{*)} Peneliti pada PKDA I LAN., Dosen STIA LAN Bandung

Pada akhir abad 19 barang-barang terbuat dari baja yang berasal dari Eropa melanda kehidupan masyarakat Aborijin. Hal ini dimulai pada saat para misionaris memberikan kapak dari baja kepada para wanita dan anak-anak sebagai imbalan atas pekerjaannya dan sebagai imbalan terhadap kesetiiaannya. Tiba-tiba para pria menyadari bahwa diri mereka menjadi berubah posisi atas dasar ketergantungan mereka kepada para wanita dan anak-anak yang telah memiliki kapak baja, sekarang merekalah yang meminjam kapak kepada para wanita dan hapus pulalah budaya kehidupan kapak batu bersamaan dengan hapusnya maskulinitas, serta upacara-upacara resmi yang dulu punya hubungan dengan suku lain dalam perdagangan batu dan kapak batu., dengan demikian masyarakat Aborigin dengan kapak batunya menjadi hancur, sebagai korban perubahan teknologi.

Penulis sengaja memberikan gambaran budaya yang primitif, dengan maksud untuk menunjukkan, bahwa budaya korupsi adalah budaya yang sangat primitif, yang digunakan sebagai landasan untuk mencapai kemakmuran. Di negara-negara moderen, dewasa ini memakmurkan bangsa, dicapai dengan melalui pengembangan profesionalisme bangsanya baik dilakukan dengan melalui pendidikan, pelatihan dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam abad 21, pendekatan perubahan kembali terjadi adu kekuatan antara budaya dengan teknologi, yaitu antara budaya organisasi atau masyarakat dengan teknologi informasi. Dalam kasus Indonesia seperti dituturkan Kristiadi (dalam ceramahnya pada pada perkuliahan program S.2 Kebijakan

Publik kerjasama UNPAD-LAN tahun 2000.di Bandung), maka dewasa ini budaya korupsi masih jauh lebih kuat dari teknologi. Hal ini terbukti dengan penyimpangan perilaku petugas yang menghambat pelaksanaan program E-Government. Konsep E-Government, di ujicobakan dalam urusan pembayaran pajak atau bea, dengan E-Government, hubungan langsung yang bersifat tatap muka antara pembayar bea dan petugas tidak akan terjadi sehingga diharapkan interaksi yang bersifat manipulatif dan sogok menyogok tidak terjadi, demikian pula waktu dapat dihemat, kemacetan lalu lintas dapat dihemat. Harapan tersebut ternyata tidak terlaksana karena budaya mengeruk keuntungan dengan menghalalkan segala cara masih sangat kuat, petugas dengan segala cara berusaha agar pelanggan datang langsung, dengan cara tidak mengoperasikan sistem yang telah disiapkan dan dengan demikian segalanya kembali seperti semula; antrian panjang, jasa bagi mereka yang terburu waktu terpaksa harus dikeluarkan untuk mempercepat proses. Dari fenomena diatas, maka kita harus percaya bahwa nilai-nilai sosial merupakan hal yang fundamental

Nilai-nilai sosial tersebut diatas dapat mendorong berbagai kekuatan, mempengaruhi segala sesuatu yang membangun suatu tatanan, namun demikian teknologipun dewasa ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sampai batas-batas tertentu. Budaya organisasi, memegang peranan yang sangat besar dibanding dengan masa sebelumnya, demikian pula lebih besar daripada yang diduga sebelumnya, seperti nampak dalam proses partisipasi penetapan visi dan misi dan sama pentingnya kultur ini dalam proses

pengelolaan perubahan – dalam memperkenalkan teknologi informasi, perubahan arah strategi, dsb., Dalam hal seperti diatas, bukannya peranan budaya itu berkurang ataupun berubah melainkan justru lebih besar peranannya. Teknologi informasi, walaupun memiliki potensi dalam memperbesar kemampuan jaringan kerja, namun kesemuanya tidak akan terwujud apabila tidak sesuai dengan budaya organisasi yang ada. (Schein, 1985) mendefinisikan budaya organisasi sebagai berikut: *"Organizational culture, then, is the pattern of basic assumptions, which a given group has invented, discovered, or developed in learning to cope with its problems of external adaptation and internal integration, which have work well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel, in relation to those problems."* (budaya organisasi dengan demikian merupakan pola dari asumsi-asumsi dasar yang telah ditemukan, atau dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mengatasi masalah yang dihadapi, baik yang berhubungan dengan adaptasi dengan faktor eksternal atau dalam rangka mewujudkan integrasi internal, yang sudah dianggap bisa bekerja dengan baik dan dianggap benar, oleh karena itu diajarkan kepada anggota organisasi lainnya yang baru, sebagai suatu cara yang benar dalam, mempertimbangkan segala sesuatu, berpikir, berperasaan terhadap masalah yang dihadapi.) Dari definisi diatas, dan dari contoh upaya penerapan E-Government di Indonesia, maka budaya akan jelas menunjukkan adanya keseimbangan antara adaptasi faktor eksternal

atau lingkungan eksternal dan adanya integrasi internal. Pola-pola dasar asumsi yang dipertahankan kelompok, berpengaruh terhadap strategi, struktur, teknologi Informasi, kepada masing-masing individu. Pengaruh budaya terhadap elemen-elemen diatas lebih besar daripada sebaliknya, yaitu strategi, struktur, teknologi informasi, kurang begitu fundamental pengaruhnya kepada budaya. Asumsi-asumsi pola perilaku korupsi atau budaya korupsi yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu dalam organisasi pemerintah dan swasta di Indonesia, perlu dirubah sedemikian rupa sehingga akan sangat mempengaruhi keberhasilan perubahan strategi organisasi dalam merubah budaya korupsi menjadi budaya mengedepankan kepentingan bangsa. Banyak perbedaan pendapat tentang korupsi yang harus kita jauhi, seperti misalnya kesimpangsiuran antara hadiah dan suap; upaya-upaya pembenaran terhadap korupsi bayak pula dilakukan oleh kelompok interest tertentu, yang menyatakan bahwa dilingkungan budaya tertentu, korupsi itu dibenarkan. Sebagai contoh: banyak pejabat yang berpendapat bahwa apa yang mereka terima sebagai suap, sebenarnya sah-sah saja karena berasal dari budaya zaman raja-raja dulu yang biasa menerima upeti dari rakyatnya. (upeti diberikan bisa karena paksaan, bisa juga karena kecintaan rakyatnya kepada raja yang arif dan bijaksana). Kelompok yang beranggapan demikian, dapat dikatakan sebagai kelompok "primitif". Ia masih tertidur di zaman kapak batu, dan pada zaman teknologi informasi, demokratisasi ini, ia belum juga terbangun.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DIBEKERJA NEGARA:

Di Malaysia dibentuk Anti Corruption Agency (ACA), badan ini menciptakan cara baru dan sarana untuk mengatasi masalah korupsi dalam merealisasikan visi, yaitu mewujudkan masyarakat Malaysia bebas korupsi. Badan ini bertujuan untuk mencegah dan membasmi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan yang dilarang oleh hukum, keadilan, secara berkesinambungan dan dengan penuh kepercayaan dengan dukungan penuh dari publik, serta dengan kebijakan anti korupsi dan dengan strategi pemberantasan korupsi. Pada tahun I informasi yang diterima dan ditemukan adalah yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Jumlah informasi yang masuk dari tahun ketahun selalu meningkat, tahun 1964 informasi yang diterima sebanyak 334, tahun 1967 melonjak menjadi 6.155, dan tahun 1995 sebanyak 8.505. Pada tahun I jumlah penahanan atas masyarakat sipil 62% dari jumlah kasus, sedangkan pegawai negeri sebanyak 38%; pada tahun berikutnya masyarakat sipil 37% sedangkan aparat pemerintah sebanyak 61%. Lima pendekatan yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam investigasi korupsi yaitu: 1. Menuntut pelaku korupsi, apabila bukti-bukti telah mencukupi, 2. Membuka kasus pelanggaran dalam disiplin pegawai negeri dan merekomendasikan tindakan disipliner kepada badan penegakan disiplin. 3. mengidentifikasi kelemahan-kelemahan atau lubang-lubang yang mengarah kepada korupsi/malpraktek didalam sistem kerja dalam suatu organisasi, setelah ditemukan, lalu diusulkan untuk memperbaikinya agar kemungkinan

kekerasan dan korupsi dapat dikurangi. 4. memberikan bantuan kepada badan pemerintah lainnya, seperti misalnya: polisi, pabean, pendapatan Daerah dsb. dengan menyampaikan informasi kepada mereka dan bukti-bukti pelaku yang termasuk kedalam kewenangan yurisdiksi mereka, akan tetapi tersingkap kasusnya pada saat investigasi oleh ACA. 5. Menggali sumber-sumber untuk ACA guna membiayai upaya-upaya penumpasan korupsi dimasa yang akan datang. Identitas informan dirahasiakan dan dilindungi, semua pelapor diharuskan atau diperkenankan untuk tidak mengemukakan identitas. Strategi pencegahan korupsi dilakukan dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa praktek korupsi, dan perilaku mereka yang mendorong terjadinya korupsi tidak akan menghasilkan apa-apa. 2. memberikan informasi kepada publik tentang akibat serius korupsi apabila tidak diberantas, serta menjelaskan berbagai faktor penyebabnya, keseriusan pemerintah dalam memberantasnya. 3. menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, 4. pendidikan dan pelatihan, 5. mobilisasi media, 6. pencegahan budaya favouritisme, tanpa pandang bulu semua akan dituntut apabila ada bukti. Upaya ini telah memberikan hasil sbb: antara tahun 1991-1995 ada 922 orang yang diadili dan meliputi 1.374 kasus. Upaya selanjutnya diikuti dengan: 7. Melaksanakan strategi baru yaitu a. Memfokuskan investigasi kepada departemen atau perusahaan yang diduga kritis dalam hal korupsi; b. membentuk komite etika, kualitas, dan produktivitas didalam departemen ybs. Dibawah kepemimpinan yang kuat, nampaknya upaya-upaya ini dapat diperoleh hasil yang memadai dan Malaysia berhasil dalam mengatasi krisis seperti yang dialami negara-negara lainnya.

Di Hongkong: dibentuk ICAC (*Independent Commission Against Corruption*), badan anti korupsi sudah dibentuk sejak tahun 1974. Korupsi di Hongkong sangat merajalela, menyebar kemana-mana; sudah berurat dan berakar, terorganisasikan dengan baik, dan pada umumnya mendapat toleransi semua pihak, sehingga dengan demikian sudah merupakan korupsi yang sistemik. Institusi publik yang paling banyak terpengaruh adalah institusi yang memberikan pelayanan publik, dilingkungan polisi, bea cukai, imigrasi, pemadam kebakaran, lembaga pemasyarakatan, sedangkan departemen lainnya ialah perumahan, pekerjaan umum, pendidikan dan kesehatan. Hong Kong sudah sejak lama menderita penyakit korupsi, tahun 1898 undang-undang anti korupsi sudah dibutuhkan, tahun 1945 korupsi berkecamuk didalam masyarakat yang kacau balau, demikian pula kondisi perdagangan, tahun 1948 undang-undang anti korupsi diperkuat, tapi situasi jadi lebih memburuk, 1971 peraturan jauh lebih kuat, tapi tetap saja kondisinya lebih buruk. Hal ini disebabkan antara lain: a. pertumbuhan penduduk yang makin pesat 1945 hanya berjumlah 1 juta, akan tetapi 1974 mencapai diatas 4 juta, konsekuensinya ialah terjadinya ancaman besar terhadap sumber-sumber milik negara. b. aktivitas ekonomi ditandai dengan pertumbuhan perdagangan yang pesat dengan Cina dan seluruh dunia dengan berbagai iklim yang berbeda, intervensi pemerintah sangat minim dalam dunia ekonomi, lalu suap-menyuap kepada pegawai pemerintah berkecamuk, adanya komisi rahasia dilingkungan dunia bisnis. c. Dikalangan masyarakat sendiri, secara mayoritas terdapat para imigran dari Cina yang merupakan bagian dari kelompok yang mengalami

endemik korupsi dinegara asalnya, yaitu terbiasa memberikan hadiah bagi pemerintah atas pelayanan apapun yang diberikan pemerintah kepadanya. Setiba di Hongkong, mereka merasa tidak memiliki harapan, sehingga mereka terdorong untuk melakukan perampokan, dalam upaya mempertahankan hidupnya di Hongkong mereka melakukan penyuaipan dalam berbagai hal. Peraturan-peraturan, pengawasan, perizinan menjadi sumber peluang terjadinya korupsi dalam bidang: bangunan, import-eksport-prostitusi-perjudian, obat terlarang, pasar, imigrasi dan emigrasi. Korupsi dikalangan polisi tumbuh berkelanjutan; seperti misalnya: tilang pada lampu setopan dimana terdapat kontak sehari-hari dengan publik, pada jajaran bawah, terdapat penolakan terhadap pembasmian sindikat korupsi; para pimpinan /manajemen kepolisian tidak mampu atau tidak mau bertindak. e. adanya ketidak puasan polisi terhadap pemberantasan korupsi- terjadinya kehilangan yang misterius sejumlah polisi senior Eropa dari Hongkong dibawah investigasi korupsi. f. keputusan politik yang krusial: dalam memberantas korupsi, menghancurkan aturan-aturan sosial Untuk mengatasi kondisi diatas, maka dikeluarkan keputusan yang radikal dengan mengalihkan tanggung jawab polisi kepada badan independen dan pelayanan publik untuk mempengaruhi moral polisi - adanya komitmen dalam penyediaan personal dan dana-kesiapan untuk menghadapi berbagai konsekuensi. Adapun pemecahan masalahnya dilakukan sebagai berikut:

1. dilakukan pembenahan legislasi yang memperkuat pencegahan penyuaipan: seperti pelanggaran dalam pelaksanaan 'penalti', penyitaan dan pembekuan aset, alat-alat pembuktian, kewenangan investigasi;

legislasi pembentukan ICAC agar dapat berfungsi. Strategi yang dijalankan tidak hanya investigasi dan penuntutan saja, akan tetapi yang paling esensial ialah upaya merubah perasaan, menumbuhkan kembali hati nurani dan pikiran serta lingkungan kerja., melaksanakan investigasi, pencegahan, pendidikan, dan mengupayakan dukungan dari semua pihak, dan mobilisasi media, memfokuskan kepada perbaikan sistem, Dilakukan rekrutmen antara lain para investigator, warga setempat, staff administratif, pejabat polisi Hongkong digantikan oleh pejabat polisi Inggris, ahli mesin yang berpengalaman, akuntan, dan sistem analis, ahli media, guru-guru, disainer,, ahli pelayanan publik; dan publik relations komunitas, kampanye terus menerus tentang bahaya korupsi, mendorong agar masyarakat melaporkan adanya tindak korupsi;. Hasil investigasi,: 88% berasal dari sektor publik, 12% berasal dari sektor privat; 45% berasal dari sektor kepolisian Kesulitan yang dihadapi: umumnya yaitu adanya penolakan para klien dalam memberikan informasi masalah yang mereka alami atau tidak mau meminta pertolongan ICAC, kegagalan pegawai negeri untuk melaksanakan kewenangannya karena takut menjadi korban favouritisme, atau bahkan dituntut melakukan korupsi dan bahkan berbalik menjadi tersangka, pendekatan yang bersifat "piecemeal", kesulitan dalam merekrut staf ahli dan berpengalaman, pengusulan metode yang lebih terstruktur dalam melaksanakan pendelegasian wewenang untuk menyusun -ceklis pemeriksaan/inspeksi, menentukan sistem evaluasi, kinerja kontraktor; sistem asesmen tender; pendekatan secara global terhadap korupsi, pencegahan penyebab moral rendah.

Penolakan publik terhadap pelayanan ICAC; legislasi yang lemah .

Pentingnya komitmen dalam mewujudkan ransparansi, ditandai dengan adanya campuran tangan badann internasional jang bernama IT (International Transparency). Dr. Peter S. Schonhofer, aktivis anti korupsi di Jerman, sebagai tokoh penerima penghargaan integritas tahun TI 2002, telah melakukan otokritik tentang korupsi di Perusahaan Farmasi. Kapten Mustapha Adib dari Marokko menerimanya pada tahun 2000 karena mengungkap korupsi di angkatan bersenjata Marokko. Jana Dubovcova hakim kepala di Slowakia berhasil mengungkap penyogokan kepada para hakim. Luis Roberto Mesquita, seorang pengusaha Brazil, telah mengajak 1 juta jiwa penduduk kota untuk menolak calon-calon yang terindikasikan korupsi pada pemilihan wakil pemerintahan kota setempat

Upaya lain yang dilakukan beberapa negara seperti: Philipina, Ukraina, Afrika dan amerika latin, ialah dengan memanfaatkan bantuan Amerika. Amerika membantu dalam memberikan pendidikan kepada para jurnalist , mencoba mendorong komitmen media informasi dalam memerangi korupsi, menyelenggarakan seminar dan pelatihan bagaimana caranya melakukan investigasi korupsi, bagaimana caranya melakukan pemberitaan yang objektif tentang berbagai skandal korupsi, memberikan pelatihan teknik pelaporan yang memenuhi standard etika dan standard profesionalisme jurnalistik. Membantu Philipina dalam mendokumentasikan kasus-kasus korupsi oleh suatu badan yang bernama " The Center For Investigative Journalism". Badan ini juga berusaha menangani upaya identifikasi korupsi

sebanyak mungkin oleh masyarakat.. Upaya ini berhasil baik dalam menentang korupsi. Berdasarkan hasil penelitiannya, organisasi ini berhasil menerbitkan buku dengan judul: "Pork & other Perks" (Babi dan kesombongan lainnya) yang membantu kampanye anti korupsi pada tahun 1998 dalam Pemilihan Umum, dimana para kandidat yang penuh dengan catatan korupsi disarankan untuk tidak dipilih. Upaya ini memberikan hasil yang baik dalam menentang korupsi di Philipina. Bekerjasama dengan berbagai LSM (NGO), mobilisasi kesadaran masyarakat dalam membasmi korupsi, Amerika juga mencoba bekerjasama dengan badan-badan internasional yang memberikan donor kepada negara-negara berkembang, seperti World Bank. OECD.; di Amerika Latin melalui DCG (Donor Consultative Group) di Afrika melalui GCA (Global Coalition for Africa), yang sedikit banyak mampu memberikan tekanan-tekanan terhadap penyalahgunaan penggunaan dana yang diberikan sebagai donor.

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik secara legal, maupun secara institusional diatas kertas telah diluncurkan, seperti misalnya digelarnya operasi tertib, dizaman pemerintahan Soeharto, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), di era reformasi, tapi kinerja badan-badan ini belum berhasil banyak untuk menyeret para koruptor kakap kemeja hijau dan diakhiri dengan hukuman penjara, sementara dinegara lain, hasil kerja badan pembasmi korupsi bisa menyelesaikan ribuan kasus (Malaysia 1991-1995 sebanyak 1.374 kasus; Hongkong,

melakukan pencegahan korupsi sebanyak 1.830 kasus dikalangan instansi pemerintah;1400 dikalangan swasta).Di Indonesia yang setiap hari ditayangkan di televisi yang mampu baru meliputi kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil, seperti pembunuhan, narkoba, pencurian, perampokan yang kesemuanya hanya memperjuangkan nilai yang jauh lebih kecil daripada apa yang dilakukan oleh para pejabat. Sebagai contoh : kasus skandal dana non budjeter Bulog sebesar Rp.40 Milliar sbagai kasus pidana korupsi;skandal cessie Bank bali senilai Rp.904,6 milliar; kasus kekayaan jaksa agung yang tidak jelas asal usulnya, koruptor yang lari keluar negeri dengan membawa kekayaannya, kasus L/C (Letter of Credit) yang berpotensi merugikan Bank Negara Indonesia sebesar Rp.1,2 triliun rupiah pada tahun 2003 ini. dan banyak lagi kasus korupsi lainnya yang besar-besar yang tidak/belum berhasil ditangani .Ada kecenderungan bahwa kasus korupsi di Indonesia pada umumnya diselamatkan oleh manuver politik, atau diselamatkan oleh isu baru lainnya yang diangkat untuk mengalihkan perhatian dari kasus semula.(Harian Pikiran Rakyat ,14 Oktober 2002, hal.21.). Kanyataannya s/d hari ini tahun 2003, para pejabat tersebut tetap eksis dan menduduki posisi yang sangat menentukan.

Secara ringkas, Klittgaard (1996) mmenyatakan bahwa: "Corruption is the misuse of office for unofficial ends" (korupsi adalah penyalah gunaan urusan dinas untuk tujuan diluar kedinasan). Lebih jauh dijelaskan lagi bahwa bentuk korupsi sangat bervariasi, seperti misalnya dalam bentuk pemberian uang suap, pemerasan, nepotisme, uang pelicin untuk mempercepat proses,

kolusi dsb. Walaupun dianggap bahwa korupsi merupakan dosa pemerintah, sebagai contoh: rusaknya tatanan ekonomi, dan ekonomi rakyat sebagai akibat ekonomi biaya tinggi yang mendorong tumbuh suburnya pengangguran, budaya premanisme, budaya apatis, egoisme, akan tetapi dikalangan swasta pun ada. Demikian pula ternyata bahwa pada umumnya korupsi di sektor publik, selalu melibatkan sektor swasta. Namun demikian korupsi pasti berhubungan dengan nilai-nilai tertentu dan budaya tertentu.

Penelitian yang mendalam telah dilakukan (Institute on Governance, 1996), dan secara umum dimanapun orang tahu akan perbedaan antara hadiah dan suap. Betapa berbahayanya korupsi, dapat disimak dari pernyataan beberapa pemimpin sbb. 1. Pemimpin partai komunis China mengibaratkan korupsi bagaikan virus; yang lainnya mengibaratkan sebagai penyakit AIDS yang mematikan. Bentuk korupsi yang sudah menyebar kemana-mana, dimana hampir setiap orang melakukannya disebut dengan "Systemic Corruption", sementara bentuk lainnya, hanya merupakan pilihan individu dalam memecahkan persoalannya. Dikebanyakan negara, terjadi bahwa ada invasi korupsi dari pihak lain seperti misalnya adanya semacam kelompok kriminal bergaya mafia. (Osborne, 1996). Mungkin jenis korupsi di Hongkong pada zamannya dan di Indonesia sekarang ini merupakan jenis korupsi sistemik, sehingga sulit sekali menindak para koruptor kakap yang menduduki posisi penting, karena mendapat dukungan banyak pihak disekelilingnya.

Kebanyakan system akan potensial untuk menghasilkan korupsi, dan benar bahwa suatu

system kadang-kadang dapat diperbaiki dengan melalui korupsi, akan tetapi apabila korupsi ini telah menyebar dimana-mana, maka ia akan berubah menjadi pembunuh, Masih segar dalam ingatan kita, sebagai akibat penyalahgunaan perizinan, telah memporakporandakan lingkungan hidup, lalu bencana banjir telah menyapu ratusan nyawa penduduk sekitarnya, peristiwa Bahorok dengan jumlah 71 tewas sebagai akibat penggundulan gunung Leuser, sebelumnya peristiwa yang sama di Pacet Jawa Timur), penggali pasir tertimbun runtuhannya bukit galian C, di Jawa Barat, dst.

Sebenarnya solusi korupsi sangat mudah yaitu apabila setiap orang taat kepada aturan dan memiliki rasa tanggung jawabnya. Faktor kritis yang perlu dihadapi dalam perubahan, dan menentukan arah perubahan tersebut adalah: adanya perbedaan kultur/budaya organisasi. Ada yang lebih bersifat: berbudaya manajemen wirausaha, dimana adanya kontrol internal, kreativitas, otonomi individu, desentralisasi, jaringan kerja dsb ataukah akan mengikuti pendekatan manajemen profesional yang bersifat external control; rasionalitas, sentralisasi, hierahis, berorientasi kepada biaya serendah-rendahnya, dsb.

Kultur dalam organisasi yang lebih besar yaitu dalam masyarakat, akan banyak mempengaruhi para individu, seperti dewasa ini sedang berkembang apa yang disebut dengan "client centered therapy" dalam bidang kesehatan "student centered study"

dalam bidang pendidikan. "customer centered" muncul sebagai jawaban terhadap kompetisi global. Dan merupakan inti dari

konsep "Total Quality Management" Interdependensi didalam organisasi juga akan mendorong kearah interdependensi didalam masyarakat, karena organisasi merupakan microcosmos atau sebagai bagian dari kosmos secara menyeluruh. Gerakan interdependensi yang makin meluas dimasyarakat dunia, ialah makin bertumbuhnya gerakan sistem ekologi, ekonomi global, dan berbagai ancaman lainnya.

Bahwa korupsi akan berlangsung bila terjadi interaksi diantara simpul-simpul budaya korupsi antara sektor publik dengan sektor swasta, oleh karena itu perlu perubahan lingkungan dimana terjadi interaksi tersebut, untuk itu harus ada mobilisasi publik untuk adanya perubahan, dengan tujuan untuk meminimalisasi kesempatan korupsi, berdasarkan perubahan struktur insentif yang mengurangi perilaku korupsi. antara lain melalui reformasi administrasi dan "institution Building" yaitu melalui kerja sama antara masyarakat sipil, swasta dan semua sektor untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi; mendorong semua pihak untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pemerintah; mendorong perubahan perilaku dan praktek korupsi menjadi perilaku melindungi kepentingan umum/bersama.. Biasanya korupsi terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara pelaku publik dan pelaku privat atau antara public official dengan citizens; atau antara birokrat dengan investor.. Pada umumnya ketidak seimbangan tersebut terjadi karena public-officials punya kewenangan yang lebih luas, akuntabilitasnya rendah dan sistem insentif terganggu. Upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah: 1. Penetapan aturan yang mendorong agar campur tangan pemerintah dikurangi

dalam bidang-bidang yang mampu dilayani swasta 2. Penyederhanaan prosedur, sehingga "meja" yang harus dilalui berkurang. 3. memperbaiki mekanisme akuntabilitas, 4. Memperbaiki sistem insentif agar para pejabat publik terdorong untuk melayani kepentingan publik. 5. perubahan aturan dalam interaksi antara publik dan privat, agar bisa merubah biaya dan manfaat sehubungan dengan praktek korupsi, antara lain adanya laporan keuangan untuk publik. 6. Ada aturan yang memungkinkan anggota masyarakat duduk dalam keanggotaan panitia lelang, panitia pembelian, dan persetujuan kontrak di daerahnya. 7. Pengaturan gaji para pejabat pengadilan sesuai dengan kepatutan. 8. Seleksi pegawai berdasarkan merit sistem. 9. dilaksanakannya komputerisasi di pengadilan dengan maksud agar anggota masyarakat yang berhubungan dengan urusan peradilan dapat melihat sendiri catatan peradilan-nya. 10. merubah perilaku melalui berbagai pelatihan. 11. Menggunakan institusi pelatihan yang terakreditasi dengan nilai baik 11. Pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan umum sistem keuangan negara agar mampu melakukan investigasi. 12. Apabila dengan semua upaya ini tidak bisa berjalan, maka masyarakat tidak ada salahnya untuk mengajukannya ke badan internasional yang berwenang dan kualitatif, dengan mengantisipasi pelbagai kemungkinan yang harus diwaspadai, dan tetap berpegang teguh kepada niat baik memerangi korupsi secara sistemik.

Dari kasus-kasus diatas, mudah-mudahan ada perubahan pola pikir dan budaya korupsi, premanisme, formalitas, apatis, materialistis, menjadi budaya kepahlawanan yang tak kalah heroiknya dari tokoh-tokoh Jerman,

Marokko, Slowakia, Brazil, menjadi. Budaya kepahlawanan dalam berbagai cara untuk mengakhiri budaya korupsi di Indonesia baik dari sisi pelaku untuk secara heroik pula menebus segala kesalahannya, sedangkan dari pihak lainnya secara heroik pula untuk mengekang nafsu serakah, iri kepada koruptor lainnya yang secara fisik kaya, menahan nafsu untuk ikut-ikutan melakukan korupsi, kepahlawanan dalam memberantas korupsi serta mencegahnya agar tidak menjadikan malapetaka nasional yang mengerikan.

Sumber Bacaan;

1. Institute on Governance, Manila, 1996
2. Klittgaard, Robert, "Controlling Corruption". Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1988.
3. Osborne, Denis.1996 " Management to Fight Corruption". Jesus College. Cambridge
4. Harian Pikiran Rakyat tanggal 14 Oktober 2002. " Megapertahankan M.A. Rahman?"
5. USAID'S (January 2000) " Anti Corruption Experience", Center For Democracy and Governance . Bureau For Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency For International Development. Washington D.C.2052-31003